

MEMBANGUN EKONOMI PANCASILA

Oleh:
Ginandjar Kartasasmita
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas

Disampaikan pada Rakernas AMPI
Jakarta, 26 Agustus 1997

Akhir-akhir ini ekonomi kita digetarkan oleh goncangan dalam nilai mata uang kita. Gejolak ini sampai sekarang masih berlangsung, dan kita belum dapat mengatakan kapan keadaan menjadi mantap kembali.

Untuk sementara ini guna menghadapinya diambil berbagai langkah, baik di bidang moneter maupun fiskal, yang tujuannya adalah mengetatkan rupiah kita agar tidak mudah dijadikan alat spekulasi. Namun, tentu ada dampaknya pada sektor riil, dan pada akhirnya pada kehidupan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Keadaan ini bukan hanya kita yang mengalaminya. Juga negara-negara tetangga kita, yang selama ini selalu mendapat pujian sebagai contoh pembangunan ekonomi yang berhasil dan pengelolaan ekonomi yang baik.

Dari kejadian ini, kita mengambil pelajaran yang jelas, bahwa kita sedang memasuki dunia yang berbeda dengan yang selama ini kita kenal. Ekonomi dunia yang menyatu telah di ambang pintu. Kesehatan ekonomi suatu bangsa tidak lagi semata-mata ditentukan oleh bangsa itu, tetapi juga oleh kekuatan-kekuatan lain. Kalau kita mengatakan kekuatan pasar, maka tidak bisa lagi kita membedakan secara tegas, kekuatan pasar domestik atau kekuatan pasar asing. Karena pasar dunia sudah mulai menyatu, maka kekuatannya pun tidak dibatasi oleh tapal batas negara.

Kejadian ini merupakan ujian bagi kita dalam memasuki era globalisasi. Jika kita lulus dengan baik, maka ekonomi kita akan makin kuat dan bertahan menghadapi gejolak-gejolak di masa depan.

Namun, tidak berarti tantangan kita sudah berhenti di situ, karena tantangan demi tantangan akan terus dihadapi bukan hanya oleh Indonesia, tetapi oleh semua negara di dunia, terutama bangsa-bangsa yang sedang memantapkan pertumbuhannya, melewati tahap awal perkembangannya.

Oleh karena itu, harus menjadi agenda utama negara-negara tersebut, termasuk Indonesia untuk memperkuat ketahanan ekonominya dan memperkuat daya saingnya. Mengenai hal ini, kita telah banyak berbicara, dan banyak upaya telah kita lakukan ke arah itu.

Namun, tantangan yang kita hadapi lebih luas lagi, yaitu karena bagian yang besar dari rakyat Indonesia masih dalam kondisi tertinggal. Masalah daya saing harus diartikan juga sebagai upaya meningkatkan daya saing nasional, termasuk mereka yang berada di lapisan bawah ekonomi kita. Bahkan mereka harus memperoleh perhatian yang lebih besar. Oleh karena jumlahnya banyak, potensinya juga besar jika dapat ditingkatkan sebagai sumber daya yang produktif.

Jadi kita menghadapi dua tantangan besar, yaitu *pertama*, menghadapi era globalisasi dan ekonomi pasar global yang tidak dapat tidak, akan kita masuki. *Kedua*, membangun kemampuan ekonomi dan kesejahteraan seluruh rakyat terutama lapisan masyarakat yang tertinggal dan harus kita percepat pertumbuhannya.

Menurut hemat saya, kita hanya dapat mengatasi tantangan-tantangan besar itu kalau kita mampu menghimpun seluruh kekuatan yang kita miliki, baik yang ada pada pemerintah maupun di masyarakat.

Menghadapi tantangan yang pertama, kita harus menggalang segenap kekuatan yang ada pada kita untuk memenangkan persaingan. Untuk itu, kita harus saling menunjang, saling memperkuat, dan saling membantu. Baik yang besar, menengah, maupun yang kecil, baik di pusat maupun di daerah, di kawasan barat maupun di kawasan timur, di desa maupun di kota, dan di semua sektor pembangunan.

Dalam meningkatkan daya saing kita harus bersatu, tidak boleh ada celah atau pergesekan di antara kita. Bersatu saja masih sulit, apalagi kalau terpecah belah. Jangan kita mempertentangkan satu dengan yang lain, dan menciptakan situasi antagonis dalam masyarakat kita.

Juga bersama-sama kita harus menghadapi tantangan yang kedua, yaitu pemerataan hasil dan partisipasi pembangunan yang pada akhirnya juga pemerataan kemampuan untuk bersaing. Kalau saya mengatakan demikian, tidak berarti semua usaha sama besarnya, tentu tidak. Karena itu, usaha besar, menengah, dan kecil tetap akan ada, namun semuanya memiliki peran. Yang ingin saya katakan baik yang besar, menengah, maupun kecil, memiliki tubuh yang kuat, artinya daya saingnya kuat, handal, dan mandiri.

Tidak mungkin kita bisa mengatasi tantangan pertama tanpa mengatasi tantangan yang kedua, karena berarti tidak semua potensi kita manfaatkan. Ibarat mesin ia pincang, karena hanya sebagian saja yang berfungsi. Bagian yang tidak berfungsi justru akan membebani yang berfungsi baik dan mesin secara keseluruhan.

Sebaliknya, kita tidak akan bisa mengatasi tantangan yang kedua tanpa mampu mengatasi tantangan yang pertama. Untuk bisa membantu, dan mempercepat, pertumbuhan kalangan masyarakat yang tertinggal dan lemah atau rendah produktivitasnya, diperlukan sumber daya, dan sumber daya itu diperoleh dari hasil kita mengembangkan kemampuan karena memenangkan persaingan.

Oleh karena itu, kedua sasaran tersebut harus kita capai secara bersamaan, karena yang satu dibutuhkan untuk memperkuat yang lain.

Dalam mencurahkan perhatian pada upaya-upaya besar di atas kita juga tidak boleh hanyut begitu saja. Bahkan ekonomi kita tidak boleh hilang kemudi, betapa pun kuatnya arus yang membawanya. Kemudi itu adalah nilai yang dikandung pada waktu bangsa ini memproklamasikan kemerdekaannya. Itu adalah Pancasila.

Oleh karena itu, rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR, mengatakan bahwa pembangunan nasional kita adalah pengamalan Pancasila. Kita selalu mengatakan bahwa tujuan pembangunan kita adalah membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, maka pembangunan ekonomi kita pun haruslah berlandaskan Pancasila, sebagai dasar, tujuan, dan pedoman dalam penyelenggaraannya. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka yang ingin kita bangun adalah **Ekonomi Pancasila**.

Saya mengetahui bahwa banyak pakar telah mencoba merumuskan apa yang dimaksud dengan Ekonomi Pancasila. Tampaknya selama ini belum tercapai konsensus ke arah satu pengertian. Bahkan banyak yang mencoba menghindari menggunakan istilah itu. Saya bisa memahami kalau selama ini ada kekhawatiran dalam merumuskan Ekonomi Pancasila, oleh karena memang kondisi ekonomi kita pada waktu yang lalu masih begitu tertinggalnya, sehingga berbicara mengenai idealisme yang demikian akan dirasakan bertentangan dengan kenyataan dalam kehidupan yang sesungguhnya.

Namun, dewasa ini saya berpendapat bahwa sudah saatnya kita menentukan sikap dan membulatkan niat untuk membangun ekonomi menuju arah sesuai cita-cita para pendiri Republik ini.

Sekurang-kurangnya ada tiga pertimbangan mengapa saya mengemukakan pandangan itu.

Pertama, perkembangan ekonomi dunia, arus globalisasi yang akan tercermin dalam menyatunya sistem perdagangan dan keuangan dunia, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat kita harus memantapkan arah perkembangan ekonomi kita, agar tidak terombang-ambing termasuk oleh arus pasar tanpa kendali. Kendali itu haruslah nilai-nilai Pancasila yang kita tuangkan dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan dan langkah-langkah kita di bidang ekonomi.

Kedua, pembangunan selama ini telah memberikan hasil yang cukup nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi nasional, sehingga memberikan modal dan kesempatan kepada kita untuk memikirkan lebih jauh idealisme pembangunan dan menjabarkannya dalam konsep-konsep yang operasional, yang secara bertahap membawa kita ke tujuan itu.

Ketiga, kehidupan dunia yang makin tidak mengenal tapal batas, justru harus membuat kita memperkuat jati diri, dan nilai-nilai yang membentuk jati diri kita itu adalah Pancasila.

Jelas tidak akan mudah bagi kita untuk mengembangkan konsep ini, karena sebagai konsep ekonomi dan konsep pembangunan harus memenuhi berbagai syarat, di samping idealisme atau pandangan-pandangan yang normatif, harus juga memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, sehingga ada asas-asas objektif dan rasional yang dapat dikembangkan. Namun, kita juga tidak berhenti mengupayakannya semata-mata karena belum ada atau belum banyak literatur yang secara mendalam mengkaji konsep ini. Justru kita harus memulainya dan mengembangkan konsensus ke arah itu.

Saya ingin mengetengahkan beberapa pemikiran dasar ke arah itu.

Pertama-tama pada tataran filosofis ekonomi Pancasila tentulah harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.

Atas dasar itu maka Ekonomi Pancasila tidak semata-mata bersifat materialistis, karena berlandas pada keimanan dan ketakwaan yang timbul dari pengakuan kita pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaan menjadi landasan spiritual, moral dan etik bagi penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan. Dengan demikian Ekonomi Pancasila dikendalikan oleh kaidah-kaidah moral dan etika, sehingga pembangunan nasional kita adalah pembangunan yang berakhlak.

Ekonomi Pancasila, dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati martabat kemanusiaan serta hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan ekonomi. Dalam ekonomi Pancasila dengan demikian tidak dikenal "*economic animal*", yang satu memangsa yang lain.

Ekonomi Pancasila berakar di bumi Indonesia. Meskipun ekonomi dunia sudah menyatu, pasar sudah menjadi global, namun selama masih ada bangsa dan negara Indonesia, maka ekonomi Indonesia tetap diabdikan bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Sila Persatuan Indonesia mengamankan kesatuan ekonomi sebagai penjabaran wawasan nusantara di bidang ekonomi. Globalisasi kegiatan ekonomi tidak menyebabkan internasionalisasi kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi kita tetap diabdikan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Ekonomi Pancasila dengan demikian berwawasan kebangsaan dan tetap membutuhkan sikap patriotik dari para pelakunya meskipun kegiatannya sudah mengglobal.

Sila keempat dalam Pancasila menunjukkan pandangan bangsa Indonesia mengenai kedaulatan rakyat dan bagaimana demokrasi dijalankan di Indonesia. Di bidang ekonomi, Ekonomi Pancasila dikelola dalam sebuah sistem demokratis yang dalam Undang-undang Dasar secara eksplisit disebut **demokrasi ekonomi**.

Nilai-nilai dasar sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menunjukkan betapa seluruh upaya pembangunan kita, seluruh upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada

terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar tadi yang masih dapat diperluas dan diperdalam, kita harus menyusun konsep-konsep bagi pelaksanaannya.

Sesungguhnya dalam Undang-undang Dasar beberapa petunjuk ke arah itu telah ada dalam berbagai pasalnya. Pasal 23, 27 ayat (1), pasal 33 dan juga pasal 34 memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk mengenai bagaimana konsep ekonomi harus dikembangkan berdasarkan Undang-undang Dasar.

Bahkan dalam pasal 33 ada penjelasan yang cukup rinci mengenai apa yang dikehendaki oleh Undang-undang Dasar, mengenai bagaimana ekonomi kita harus dikelola dan dikembangkan.

Meskipun sudah sering kita baca dan lihat, baiklah bersama-sama kita simak kembali amanat pasal 33 yang dijabarkan dalam penjelasannya. Kita perlu sekali mencamkannya, karena di atas landasan itu kita harus membangun perekonomian kita.

“Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Tantangan bagi kita sekarang adalah bagaimana secara tepat kita menjabarkannya dalam konsep-konsep pembangunan untuk nantinya dioperasionalkan dan dituangkan dalam rencana-rencana pembangunan nasional.

Dalam upaya itu jelas tidak ada jalan yang lurus dan jelas tidak ada yang mulus. Kadang-kadang kita harus berbelok ke kiri, berbelok ke kanan, bahkan kadang-kadang harus mundur dulu sedikit kemudian maju lagi. Yang penting kita harus menjaga bahwa arahnya tetap konsisten, betapa pun dari saat ke saat kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan harus disesuaikan dengan situasi. Betapa pun juga kita telah menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka, yang terus berkembang mengikuti dinamik masyarakat. Namun, nilai-nilai dasarnya tidak pernah berubah. Oleh karena itu, UUD 1945 mengamanatkan bahwa dengan mengingat dinamik masyarakat, sekali dalam 5 tahun MPR memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk di kemudian hari. Petunjuk-petunjuk itu dituangkan dalam GBHN.

Upaya untuk menjabarkan amanat konstitusi sesuai dengan perkembangan situasi telah dilakukan sejak PJP I, GBHN demi GBHN, sampai GBHN 1993. Sekarang kita sedang dalam persiapan menyusun bahan-bahan untuk GBHN 1998.

Dalam tataran operasional, yang sangat diperlukan adalah konsep mengenai bagaimana peran para pelaku ekonomi dalam sistem Ekonomi Pancasila, dalam menghadapi tantangan-tantangan besar di masa depan, yang dua di antaranya sangat menonjol seperti saya kemukakan di atas, yaitu menghadapi ekonomi global dengan meningkatkan daya saing dan membangun semua potensi ekonomi di dalam negeri agar tumbuh kuat dan dapat turut menyumbang kepada kekuatan

ekonomi nasional. Sasarannya adalah membangun masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan, di atas landasan keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan yang berkeeseimbangan.

Saya bisa mengambil sebuah contoh usaha yang telah dilakukan ke arah itu. Pada tahun 1990, ISEI dalam kongres ke XI telah mengupayakan untuk menjabarkan bagaimana peran para pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi yang ingin kita tegakkan.

Saya ingin mengutip rumusan ISEI pada tahun 1990 mengenai peran pelaku ekonomi kita itu.

“Di dalam sistem ekonomi yang berlandaskan Demokrasi Ekonomi, usaha negara, koperasi, dan usaha swasta dapat bergerak di dalam semua bidang usaha sesuai dengan peranan dan hakikatnya masing-masing. Usaha negara berperan sebagai: (a) perintis di dalam penyediaan barang dan jasa di bidang-bidang produksi yang belum cukup atau kurang merangsang prakarsa dan minat pengusaha swasta; (b) pengelola dan pengusaha di bidang-bidang produksi yang penting bagi negara; (c) pengelola dan pengusaha di bidang-bidang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak; (d) imbalan bagi kekuatan pasar pengusaha swasta; (e) pelengkap penyediaan barang dan jasa yang belum cukup disediakan oleh swasta dan koperasi, dan (f) penunjang pelaksanaan kebijaksanaan negara. Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar 1945, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan sesuai dengan hakikatnya sebagai kesatuan ekonomi yang berwatak sosial. Sedangkan usaha swasta diberi peranan yang sebesar-besarnya di dalam bidang-bidang di mana persaingan dan kerja sama berdasarkan motivasi memperoleh laba memberikan hasil terbaik bagi masyarakat diukur dengan jenis, jumlah, mutu dan harga barang dan jasa yang dapat disediakan.”

Saya ingin menunjukkan betapa para pakar kita telah berupaya untuk menjabarkan lebih lanjut pemikiran-pemikiran dasar kita itu. Upaya itupun masih dilanjutkan oleh ISEI dalam kongresnya yang ke XIII tahun lalu. Di situ ISEI menjabarkan sistem ekonomi kita memasuki abad ke-21 yaitu yang disebut sebagai ekonomi pasar terkelola. Menurut hemat saya kendali dalam pengelolaannya haruslah nilai-nilai Pancasila. Berbagai usaha tersebut harus kita lanjutkan. Kita perlu lebih memperdalam lagi rumusan tentang peran negara, koperasi dan usaha swasta dalam Ekonomi Pancasila tersebut.

Dalam GBHN 1993 antara lain disebutkan bahwa masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang. Ini juga upaya untuk menjabarkan. Jelaslah peran pemerintah sebagai pelaku aktif akan makin berkurang. Kalau kita berbicara mengenai masyarakat dalam pengertian ini, maka kita akan berbicara mengenai koperasi dan usaha swasta di luar koperasi. Bagaimana kita membangun koperasi agar betul-betul menjadi sokoguru ekonomi kita, akan merupakan tantangan yang tak henti-hentinya. Tantangan itu justru akan makin besar dengan masuknya kita ke dalam ekonomi pasar dan ke dalam pasar global.

Juga perlu dijabarkan bagaimana kita membangun usaha swasta agar dapat memotori mesin ekonomi kita dalam memasuki era perdagangan bebas. Bagaimana kita membantu usaha swasta kita untuk terus menerus meningkatkan dan memelihara daya saing. Daya saing swasta kita merupakan komponen penting dalam daya saing nasional.

Untuk meningkatkan daya saing perlu ditingkatkan efisiensi dan produktivitas. Ini harus menjadi agenda nasional bangsa kita.

Selanjutnya, perlu pula dipikirkan bagaimana kita memperbaiki struktur dunia usaha kita yang masih timpang, agar lebih kukuh dan seimbang; yakni struktur dunia usaha di mana usaha besar, menengah dan kecil saling bersinergi dan saling memperkuat dengan lapisan usaha menengah sebagai tulang punggungnya. Persoalan kita bukan ukurannya besar atau kecil, tetapi daya tahan dan daya saingnya. Yang besar tetapi lemah tidak ada manfaatnya, yang kecil tetapi kuat justru merupakan unsur yang penting terhadap keseluruhan sistem ekonomi kita. Oleh karena

itu, agenda pembangunan kita bukan mempertentangkan yang besar dengan yang kecil, tetapi membangun semua potensi yang kita miliki.

Dalam proses itu yang besar dan kecil harus bekerja sama, bermitra, untuk bersama-sama saling dukung dan saling memperkuat. Kita harus ingat pesan Undang-undang Dasar mengenai asas kekeluargaan dalam menyelenggarakan ekonomi. Demikian pula kita harus selalu ingat bahwa pengendalian diri adalah hakikat penghayatan dan pengamalan Pancasila, seperti telah kita sepakati dalam Ekaprasetia Pancakarsa. Berbagai upaya itu harus didukung oleh pemerintah, baik melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan, maupun melalui pengalokasian sumber daya yang dimilikinya atau dapat diarahkannya.

Sebagai kesimpulan, saya ingin menggarisbawahi bahwa kita harus secara sungguh-sungguh melanjutkan upaya untuk menyusun konsep ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai dasar yang menjadi semangat bangsa ini pada waktu memerdekakan diri. Konsep tersebut selain harus menjamin arah terwujudnya berbagai cita-cita itu, juga harus dapat menjawab dua tantangan besar yang dewasa ini berada di hadapan kita, yaitu memenangkan persaingan dalam era globalisasi dan membangun segenap potensi yang ada, dengan perhatian pada upaya memberdayakan masyarakat yang ekonominya tertinggal, sehingga dapat berperan secara aktif dalam kegiatan ekonomi nasional.

Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk mengembangkan pemikiran-pemikirannya dan menyusun konsep-konsepnya, sehingga memasuki milenium ketiga nanti kita telah sungguh-sungguh siap dan mampu memanfaatkan setiap peluang.

Para pakar dan dunia akademik khususnya, saya himbau untuk turut memperkuat pemikiran-pemikiran tersebut dengan pandangan-pandangan yang ilmiah sehingga konsep kita mengenai Ekonomi Pancasila akan kukuh, baik secara filosofis, politis, maupun secara ilmiah, sehingga mudah kita laksanakan secara operasional.

Kesempatan ini adalah kesempatan yang baik, karena kita sedang menyusun GBHN 1998, yang akan menjadi dasar bagi penyusunan Repelita VII, yang jangka waktunya tepat pada saat kita memasuki abad ke-21, dan pada saat kita memasuki era global yang pada tingkat kawasan melalui AFTA akan dimulai pada tahun 2003.

Karena tidak banyak waktu lagi, secara sungguh-sungguh kita harus mencurahkan perhatian untuk menjawab tuntutan hati nurani dan tuntutan zaman ini.

Pandangan di atas saya sampaikan melalui Rakernas AMPI, oleh karena AMPI merupakan generasi muda yang menjadi insan pembangunan kita. Juga tantangan ini saya ajukan kepada AMPI untuk turut serta menjawabnya.